

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 -2030



**BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA**

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang .....	
2. Dasar Hukum Penyusunan .....	
3. Maksud dan Tujuan .....	
4. Sistematika Penulisan .....	
BAB II Gambaran Pelayanan,Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
a. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi	
b. Sumber Daya Bapenda	
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
d. Kelompok sasaran layanan	
2. Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah	
a. Permasalahan Perangkat Daerah	
b. Isu Strategis	
BAB III Tujuan,Sasaran,Strategi dan Arah Kebijakan	
1.Tujuan Renstra PD Tahun 2025 -2029	
2.Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029	
3.Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025 – 2029	
BAB IV Program ,Kegiatan,Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
1. Urusan Program	
2. Urusa Kegiatan	
3. Uraian Sub.Kegiatan beserta Kinerja,Indikator,Target dan Pagu Indikatif	

4. Uraian Sub.Kegiatan dalam rangka mendukung Program Priorotas Pembangunan Daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama ( IKU) dan Indikator Kinerja Daerah ( IKD) pada Perangkat Daerah
6. Target Kinerj penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci ( IKK)

## BAB V Penutup

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 - 2029 disusun dalam rangka menyelaraskan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rancangan Akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2025 - 2029 melalui pelaksanaan visi dan misi serta penetapan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra ini, kami Badan Pendapatan Daerah menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat **kesalahan – kesalahan dan kekurangan – kekurangan**, oleh karena itu kami berharap dengan Rancangan Akhir Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya.

Akhir kata, semoga penyusunan Rancangan Akhir Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah ini dapat memberikan manfaat dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan kedepannya.

Tenggarong, September 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

**DR. BAHARI JOKOSUSILO, S.PT., MP**  
Pembina Utama Muda



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis ini merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memanfaatkan seluruh pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya, untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis regional, nasional dan global.

Perencanaan Strategis sering juga disebut Perencanaan Jangka Panjang (Long Range Planning) adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk melaksanakan strategi tersebut harus pula disusun program kerja yang terinci, mencakup kegiatan yang harus dilakukan, kapan harus dimulai, kapan harus selesai, dan siapa yang harus bertanggung jawab serta sumber daya manusia yang diperlukan, singkatnya perencanaan strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang sudah diformalkan, yang digunakan untuk merumuskan tujuan organisasi serta cara menghadapinya

Sebagian dari pekerjaan perencanaan strategis terfokus kepada apakah organisasi mempunyai sumber daya dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan misinya dan mewujudkan visi-nya. Pengenalan akan kekuatan yang dimiliki akan membantu organisasi untuk tetap menaruh perhatian dan melihat peluang-peluang baru, sedangkan penilaian yang jujur terhadap kelemahan-kelemahan yang ada akan memberikan bobot realisme pada rencana-rencana yang akan dibuat organisasi.

Pada sisi lain terdapat kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi tersebut. Kemampuan atau ketidak mampuan untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan utama di luar organisasi akan sangat menentukan apakah organisasi akan berhasil atau gagal menjalankan misinya dan mewujudkan visinya

Penyusunan Rencana Strategis ((Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Kartanegara Badan Pendapatan Daerah 2025 – 2029 memuat :

1. Analisis gambaran pelayanan;
2. Analisis permasalahan;
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah;
6. Perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah; dan
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Untuk mencapai target kinerja utama kepala daerah, serta untuk menangani isu strategis pelayanan Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara

Proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi internal Badan Pendapatan Daerah serta dengan para pemangku kepentingan. Keterlibatan pihak-pihak dalam penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis ini.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan dalam penyusunan Rancangan Awal Renstra( Rencana Strategis )Bapenda, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara 2000 No 54. Tambahan Lembaran Negara No 3952);

-5-

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023- 2042.

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

21. Surat Edaran Nomor : B-2838/BAPP/065.11/06/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 – 2029 adalah Mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Keuangan untuk Visi dan Misi Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD dan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja atau program kerja tahunan dan lima tahunan, serta sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun tujuannya adalah:

- Memudahkan seluruh jajaran manajemen dan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD
- Sebagai alat kendali untuk mengevaluasi kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah disusun; dan
- Terwujudnya keterpaduan dan sinergitas kebijakan dan program/kegiatan yang ditetapkan, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029 disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

#### Bab I. PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang

##### 1.2 Landasan Hukum

##### 1.3 Maksud dan Tujuan

##### 1.4 Sistematika Penulisan

#### Bab II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

##### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

##### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

##### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

##### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### 2.5 Permasalahan Perangkat Daerah

##### 2.6 Isu Strategis

### BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
- 3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

### BAB IV. PROGRAM,KEGIATAN,SUBKEGIATAN,DAN KINERJA

#### PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### BAB V. PENUTUP

## Bab II

### Gambaran Pelayanan ,Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah

##### 2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tersebut, kedudukan Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu "Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pajak Daerah, Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten"

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan;
- Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
- Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang penerimaan bukan pajak daerah.
- Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Badan
- Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas sampai dengan satu eselon dibawah kepala Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 sebagai berikut:

(1) Kepala Badan,

mempunyai tugas:

- Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Badan
- Merumuskan kebijakan teknis Badan
- Merumuskan rencana program kerja Badan
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program badan
- Merumuskan kebijakan administrasi badan
- Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi badan
- menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kepala Badan (j) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sekretaris, mempunyai tugas:

- Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian
- mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan,

administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, pengembangan inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survei index kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei index nilai persepsi korupsi
- mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG ke pegawaian, kode etik pegawai, evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, kompilasi perjanjian kinerja dan LP2P
- mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD
- mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, penghargaan, pemberian sanksi dan cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Badan

- mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan Badan
- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

(3) Bidang Pendaftaran dan Penetapan, mempunyai tugas:

- Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan pendaftaran dan penetapan meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan pajak dan dana perimbangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- memfasilitasi UPT-UPT yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai pengenaan pajak daerah yang ada di wilayahnya dan menyampaikan rekapitulasi data wajib pajak daerah kepada bidang pendaftaran dan penetapan badan pendapatan daerah
- mengkoordinasikan dan memfasilitasi Badan, Dinas/Instansi terkait mengenai data pendapatan minyak bumi, gas, royalti, landren, kehutanan dan perkebunan, perikanan, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P3 serta PPh orang pribadi dan Badan
- mengkoordinasikan dan memfasilitasi perhitungan penetapan pajak daerah serta perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah yang disetujui
- mengkoordinasikan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan
- mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pendaftaran dan penetapan;
- mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pendaftaran dan penetapan

- mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pendaftaran dan penetapan
- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

(4) Bidang Penagihan, mempunyai tugas:

- Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan (b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan penagihan meliputi penagihan pajak, keberatan dan restitusi pajak, penagihan non pajak sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan permohonan keberatan, restitusi, dan penghapusan pajak dan pemeriksaan, penyitaan aset Wajib Pajak
- mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, inventarisasi dan identifikasi data penunggak pajak dan non pajak
- mengkoordinasikan bahan pembuatan surat permintaan transfer
- mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan penagihan
- mengkoordinasikan dan mengendalikan penyediaan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan penagihan
- mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan penagihan
- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

(5) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan pembukuan dan pelaporan meliputi pembukuan pendapatan daerah, pembukuan dan verifikasi benda/surat berharga, dan pelaporan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas

- Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan dan rencana kerja tahunan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah
- mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pembukuan dan Pelaporan
- mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pembukuan dan pelaporan
- mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pembukuan dan pelaporan
- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

(6) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan, mempunyai tugas:

- Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan pendapatan meliputi perencanaan pendapatan, pengembangan sumber pendapatan, dan pengawasan penatausahaan pendapatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- mengkoordinasikan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan
- mengkoordinasi pelaksanaan fasilitasi laporan pelaksanaan kegiatan pendapatan daerah
- mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran kebijakan operasional dan strategis perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan
- mengkoordinasi, dan memfasilitasi data perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan

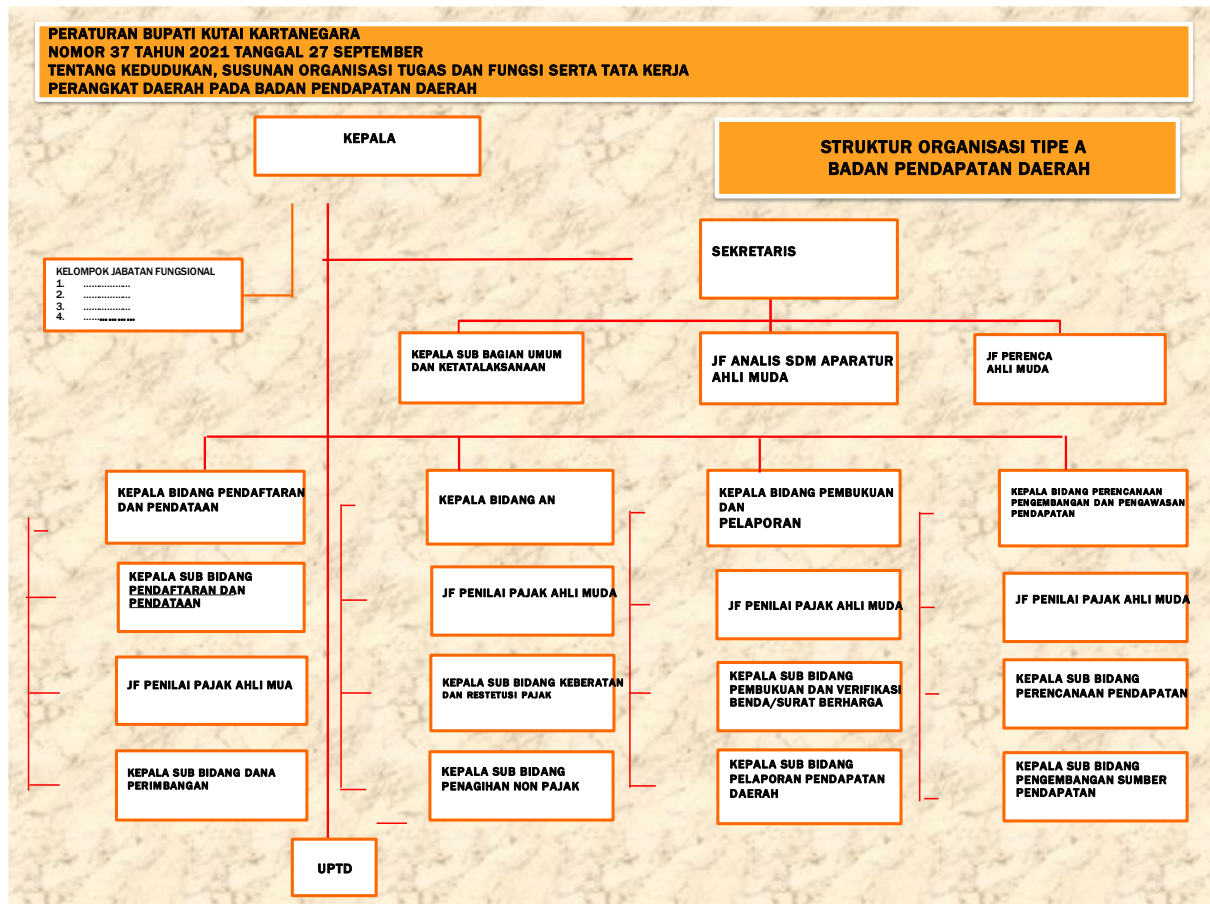
- mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan pendapatan
- mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan pendapatan
- mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan
- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

2.1.2. Susunan Organisasi Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari:

- (1) Kepala Badan;
- (2) Sekretariat, membawahkan;
  - (a) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
  - (b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
  - (c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- (3) Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahkan:
  - (a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
  - (b) Sub Bidang Penetapan Pajak; dan
  - (c) Sub Bidang Monitoring DBH
- (4) Bidang Penagihan, membawahkan:
  - (a) Sub Bidang Penagihan Pajak;
  - (b) Sub Bidang Keberatan Dan Restitusi Pajak; dan
  - (c) Sub Bidang Penagihan Non Pajak;
- (5) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan;
  - (a) Sub Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah;
  - (b) Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi Benda/Surat Berharga; dan
  - (c) Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah;
- (6) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan, membawahkan;
  - (a) Sub Bidang Pengawasan Penatausahaan Pendapatan;
  - (b) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan; dan
  - (c) Sub Bidang Pengembangan Sumber Pendapatan;

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (8) Unit Pelaksana Teknis Badan.

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



## 2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun 2024 mempunyai personil sebanyak 253 orang yang bertugas baik di Kabupaten dan tersebar di 9 UPTD Se-Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga)) Pejabat Struktural, yang terdiri dari Eselon II , III dan IV ,5 Fungsional Ahli Muda beserta 215 (dua ratus lima belas) orang pelaksana Jumlah total pegawai sebanyak 253 pegawai ( pria dan wanita). Jika dilihat berdasarkan golongan, terbanyak adalah Golongan II, yaitu 131 Pegawai,

selanjutnya golongan III sebanyak 104 pegawai, Golongan I sebanyak 3 Pegawai, dan Golongan IV sebanyak 15 Pegawai.

#### Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Gender		
	Pria	Wanita	Jumlah
I	1	2	3
II	81	50	131
III	53	51	104
IV	9	6	15
Jumlah	144	109	253

### 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

#### 2.3.1 Jenis Pelayanan

Jenis – jenis Pelayanan

##### 1. Pajak Daerah

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan
- Pajak Rokok

##### 2. Retribusi Daerah :

- Retribusi Jasa Umum
- Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Perizinan Tertentu

##### 3. Hasil Perusda Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yg dipisahkan

- Bagian Laba Perusahaan Daerah
- Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
- Kontribusi Penyertaan Modal Kepada Pihak Ketiga

#### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- Hasil Penjualan barang Milik Daerah
- Penerimaan Jasa Giro
- Penerimaan Bunga Deposito
- Penerimaan TP/TGR
- Pendapatan Denda Pajak Daerah
- Pendapatan Denda Retribusi Daerah
- Pendapatan Dari Pengembalian
- Sumbangan Pihak Ketiga

#### 5. Dana Perimbangan

##### a) Bagi Hasil Pajak

- Pajak Bumi dan Bangunan
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri
- dan PPh Ps 21

##### b) Bagi Hasil Bukan Pajak

- Provisi Sumber Daya Hutan
- Landrent
- Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi
- Minyak Bumi
- Gas Alam

##### c) Dana Alokasi Umum

#### 2.3.2 Capaian Kinerja

Peningkatan PAD khususnya pada potensi penerimaan melalui pajak dan retribusi tetap perlu diupayakan diantaranya melalui pemetaan potensi pajak dan retribusi serta peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan melalui digitalisasi sehingga kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah turut bertambah pada total komponen PAD. Selain itu, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan

inovasi sumber penerimaan salah satunya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai salah satu komponen PAD yang belum dioptimalkan kinerjanya diantaranya melalui bagi hasil pembiayaan dan BUMD

Capaian Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 – 2024 secara umum dapat dilihat pada gambar berikut

Realisasi Pendapatan Daerah dan rata rata pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2020 - 2024

## Pendapatan Daerah



Rincian Realisasi Pendapatan daerah selama tahun 2020 - 2025

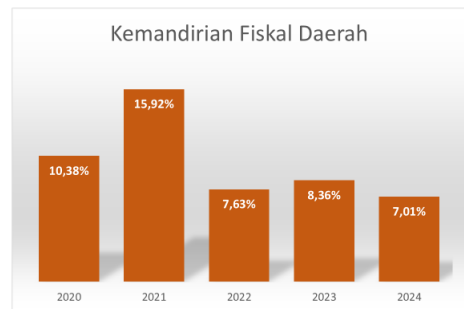
## Pendapatan Daerah

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Semester I)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.340.769.177.548,36</b>	<b>4.443.234.734.944,34</b>	<b>7.443.525.130.275,86</b>	<b>7.787.223.822.360,59</b>	<b>12.653.702.235.034,30</b>	<b>3.501.696.232.416,43</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>450.759.725.896,36</b>	<b>707.307.156.824,89</b>	<b>567.757.276.457,12</b>	<b>651.136.413.747,50</b>	<b>887.600.289.740,60</b>	<b>171.444.077.458,43</b>
Pajak Daerah	110.077.405.684,00	114.967.277.995,00	142.751.497.519,00	141.989.017.504,00	165.870.568.096,40	126.259.597.327,00
Retribusi Daerah	4.106.219.051,00	4.008.704.812,00	5.332.179.084,00	6.282.211.585,00	5.879.733.796,00	2.434.391.298,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	18.244.427.512,19	19.768.619.228,31	21.232.144.048,86	63.147.803.556,59	88.368.259.737,59	25.044.999.314,81
Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	318.331.673.669,17	568.562.554.789,58	398.441.455.805,26	439.717.381.101,91	627.481.728.110,61	17.705.089.518,62
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.885.815.451.652,00</b>	<b>3.615.376.629.670,00</b>	<b>6.764.448.480.052,00</b>	<b>7.123.560.923.471,09</b>	<b>11.685.168.989.986,00</b>	<b>3.330.252.154.958,00</b>
Transfer Pemerintah Pusat	3.547.936.253.540,00	3.215.256.827.670,00	6.153.698.018.616,00	6.258.065.047.094,09	11.038.314.476.917,00	3.176.094.023.394,00
Dana Bagi Hasil	2.722.422.883.006,00	2.375.059.171.144,00	5.193.110.973.145,00	5.100.817.921.122,00	9.840.984.241.170,00	2.994.228.957.199,00
Dana Alokasi Umum	440.463.493.000,00	443.413.042.000,00	443.970.394.500,00	493.817.232.160,00	608.978.151.168,00	164.776.337.750,00
Dana Alokasi Khusus	359.715.721.534,00	356.286.622.526,00	339.772.383.971,00	443.522.706.812,09	391.303.378.979,00	9.248.665.945,00
Insentif Fiskal	25.334.156.000,00	40.517.992.000,00	-	27.486.716.000,00	34.790.318.000,00	7.840.062.500,00
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
Dana Desa	-	-	176.844.267.000,00	192.420.471.000,00	162.258.387.600,00	-
Transfer Antar Daerah	337.879.198.112,00	400.119.802.000,00	610.750.461.436,00	865.495.876.377,00	646.854.513.069,00	154.158.131.564,00
Pendapatan Bagi Hasil	240.421.698.112,00	318.277.302.000,00	568.635.581.436,00	827.375.876.377,00	588.414.513.069,00	123.130.506.564,00
Bantuan Keuangan	97.457.500.000,00	81.842.500.000,00	42.114.880.000,00	38.120.000.000,00	58.440.000.000,00	31.027.625.000,00
<b>LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.194.000.000,00</b>	<b>120.550.948.449,45</b>	<b>111.319.373.766,74</b>	<b>12.526.485.142,00</b>	<b>80.932.955.307,69</b>	<b>-</b>
Pendapatan Hibah	4.194.000.000,00	4.626.000.000,00	3.033.000.000,00	3.567.000.000,00	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan	-	115.924.948.449,45	108.286.373.766,74	8.959.485.142,00	80.932.955.307,69	-

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu indikator kemandirian dan keberlanjutan fiskal daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Kutai kartanegara dan rata rata pertumbuhan PAD selama tahun 2020 - 2024

### PAD Kab. Kutai Kartanegara



- Kemandirian Fiskal dihitung dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah keseluruhan.
- Realisasi Tahun 2024 tertinggi sepanjang Sejarah.
- Tingginya realisasi PAD Tahun 2024 disebabkan oleh Penerimaan Lain-lain yang Sah.
- Pertumbuhan PAD mengalami inkonsistensi.

Rincian Realisasi PAD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 -2024

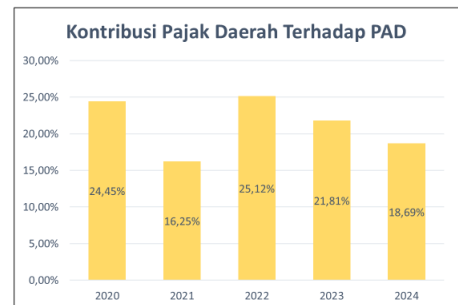
## PAD Kab. Kutai Kartanegara

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN ASLI DAERAH	450.759.725.896,36	707.307.156.824,89	567.757.276.457,12	651.136.413.747,50	887.600.289.740,60
Pajak Daerah	110.077.405.664,00	114.967.277.995,00	142.751.497.519,00	141.989.017.504,00	165.870.568.096,40
Retribusi Daerah	4.106.219.051,00	4.008.704.812,00	5.332.179.084,00	6.282.211.585,00	5.879.733.796,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	18.244.427.512,19	19.768.619.228,31	21.232.144.048,86	63.147.803.556,59	88.368.259.737,59
Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	318.331.673.669,17	568.562.554.789,58	398.441.455.805,26	439.717.381.101,91	627.481.728.110,61

URAIAN	Target	2025 (Semester I)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	953.088.447.204,00	171.444.077.458,43
Pajak Daerah	364.451.980.000,00	126.259.597.327,00
Retribusi Daerah	487.820.481.700,00	2.434.391.298,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	44.145.888.234,00	25.044.999.314,81
Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	56.670.097.270,00	17.705.089.518,62

Target dan Realisasi Capaian Pajak Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 - 2024

## Pajak Daerah Kab. Kutai Kartanegara



## Rincian Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 - 2024

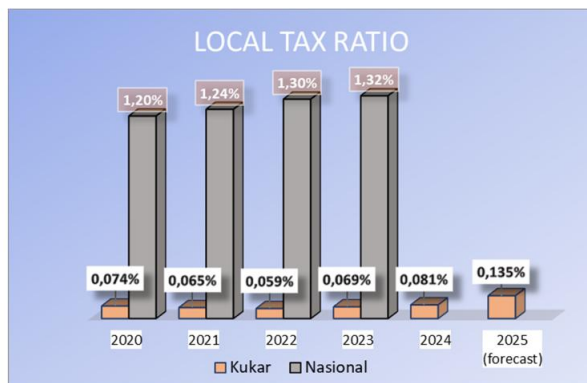
NO	Jenis Pajak	2025		
		Target	Realisasi (Semester I)	Persentase
1	PBJT Hotel	1.500.000.000,00	891.031.252,00	59%
2	PBJT Makanan/Minuman	45.000.000.000,00	17.360.236.953,00	39%
3	PBJT Hiburan	600.000.000,00	189.907.795,00	32%
4	Pajak Reklame	2.000.000.000,00	1.922.816.070,00	96%
5	PBJT Tenaga Listrik	80.000.000.000,00	40.063.058.504,00	50%
6	PBJT Parkir	250.000.000,00	146.249.800,00	58%
7	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	1.141.568.983,00	57%
8	Pajak Sarang Burung Walet	300.000.000,00	21.525.000,00	7%
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	776.687.922,00	31%
10	PBB-P2	9.000.000.000,00	2.758.328.278,00	31%
11	BPHTB	20.000.000.000,00	2.927.086.773,00	15%
12	Opsen PKB	90.443.760.000,00	25.594.087.617,00	28%
13	Opsen BBNKB	110.858.220.000,00	32.467.012.380,00	29%
<b>Jumlah</b>		<b>364.451.980.000,00</b>	<b>126.259.597.327,00</b>	<b>35%</b>

### Realisasi Pajak Daerah

NO	Jenis Pajak	Realisasi Pajak Daerah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PBJT Hotel	1.273.318.774,00	969.928.739,00	1.540.763.443,00	1.376.642.311,00	1.637.830.894,00
2	PBJT Makanan/Minuman	28.970.256.843,00	28.594.468.006,00	44.357.678.233,00	46.996.156.658,00	53.083.192.488,40
3	PBJT Hiburan	482.279.662,00	363.681.653,00	643.689.253,00	707.261.265,00	544.304.064,00
4	Pajak Reklame	1.497.057.909,00	1.966.433.097,00	1.781.631.300,00	2.386.325.012,00	2.658.759.041,00
5	PBJT Tenaga Listrik	54.450.667.888,00	54.696.093.755,00	57.153.119.488,00	64.224.102.294,00	88.208.928.874,00
6	PBJT Parkir	245.473.837,00	185.506.500,00	121.636.750,00	213.143.000,00	265.418.635,00
7	Pajak Air Tanah	1.027.411.705,00	1.470.812.335,00	2.326.658.525,00	2.845.009.439,00	2.681.687.161,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	64.498.960,00	109.142.500,00	130.872.000,00	103.850.000,00	68.370.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	499.271.247,00	514.443.639,00	728.817.762,00	1.329.792.110,00	2.545.756.837,00
10	PBB-P2	5.653.968.694,00	6.952.335.019,00	10.756.508.561,00	8.339.952.905,00	7.579.088.118,00
11	BPHTB	16.291.954.032,00	19.144.432.752,00	23.210.122.204,00	13.466.782.510,00	6.597.231.984,00
<b>Jumlah</b>		<b>110.456.159.551,00</b>	<b>114.967.277.995,00</b>	<b>142.751.497.519,00</b>	<b>141.989.017.504,00</b>	<b>165.870.568.096,40</b>

## Capaian Local Tax Ratio Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 - 2024

### Local Tax Ratio



Local Tax Ratio merupakan perbandingan antara total penerimaan Pajak Daerah dengan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Local Tax Ratio menjadi ukuran kinerja penerimaan Pajak Daerah dalam suatu wilayah

Local Tax Ratio secara nasional baru menyentuh angka 1,32% pada Tahun 2023. Angka tersebut masih perlu dioptimalkan atau setidaknya berada di angka 3% sesuai dengan amanah UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Capaian Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama Tahun 2020 - 2025

Retribusi Daerah Kab. Kutai Kartanegara

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Retribusi Daerah</b>	<b>4.106.069.051,00</b>	<b>4.008.704.812,00</b>	<b>5.332.179.084,00</b>	<b>6.278.307.385,00</b>	<b>5.879.733.796,00</b>
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>1.493.213.826,00</b>	<b>1.559.247.138,00</b>	<b>1.607.303.460,00</b>	<b>1.757.969.485,00</b>	<b>688.684.358,00</b>
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	62.285.000,00	83.000.000,00	93.200.000,00	102.725.000,00	52.400.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	135.475.000,00	129.305.000,00	134.340.000,00	53.800.000,00	54.765.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	613.449.526,00	661.889.335,00	656.999.560,00	825.398.685,00	569.688.458,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	36.445.000,00	54.675.000,00	60.800.000,00	81.125.000,00	6.862.500,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	527.151.800,00	458.471.203,00	459.515.900,00	430.377.800,00	4.968.400,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	118.407.500,00	159.306.600,00	147.423.000,00	223.443.000,00	-
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-	12.600.000,00	55.025.000,00	41.100.000,00	-
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>893.607.000,00</b>	<b>718.523.000,00</b>	<b>1.685.722.000,00</b>	<b>2.006.832.800,00</b>	<b>3.063.509.544,00</b>
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	127.455.000,00	146.615.000,00	167.506.000,00	84.525.000,00	54.755.542,00
Retribusi Terminal	11.285.000,00	13.185.000,00	14.265.000,00	18.315.000,00	21.465.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.045.000,00	12.858.000,00	87.086.000,00	166.012.000,00	258.670.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	71.325.000,00	80.475.000,00	62.100.000,00	40.275.000,00	35.100.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	102.638.000,00	268.640.000,00	218.700.000,00	296.074.800,00	319.649.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	578.859.000,00	189.700.000,00	1.127.325.000,00	1.376.651.000,00	1.692.704.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	7.050.000,00	8.740.000,00	24.980.000,00	681.166.002,00
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>1.719.248.225,00</b>	<b>1.730.934.674,00</b>	<b>2.039.153.624,00</b>	<b>2.513.505.100,00</b>	<b>2.127.539.894,00</b>
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.025.650.025,00	1.302.044.474,00	<b>2.039.153.624,00</b>	2.513.505.100,00	2.127.539.894,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	693.598.200,00	428.890.200,00	-	-	-

Rincian Capaian Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2020 - 2024

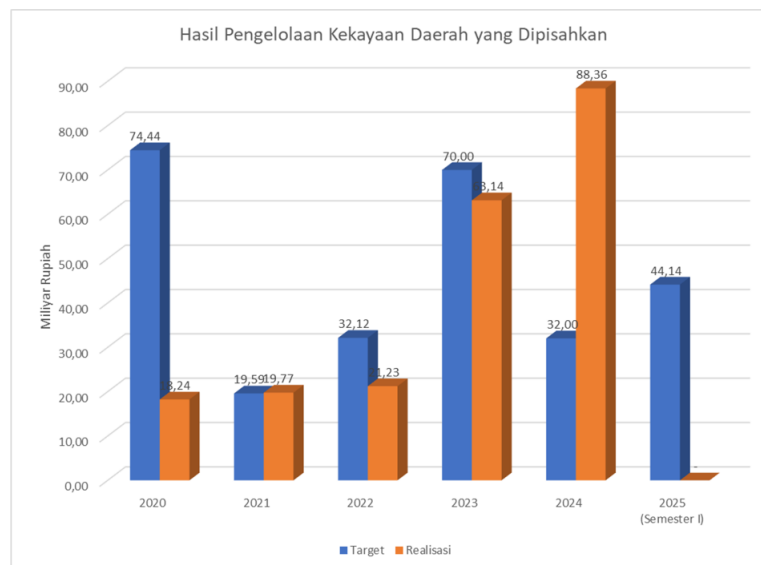
## Realisasi Retribusi Daerah

URAIAN	TARGET 2025	Semester I	PERSENTASE	OPD PEMUNGUT
Retribusi Pelayanan Kesehatan	482.982.825.700,00	147.984.201.774,68	30,64%	DINKES DAN RSUD
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	100.000.000,00	-	0,00%	DLHK
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	50.000.000,00	17.433.000,00	34,87%	DISHUB
Retribusi Pelayanan Pasar	800.000.000,00	559.428.050,00	69,93%	DISPERINDAG
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	8.550.000,00	-	DISPERKIM
<b>Jumlah Retribusi Jasa Umum</b>	<b>483.932.825.700,00</b>	<b>148.561.062.824,68</b>	<b>30,70%</b>	
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	90.000.000,00	230.000.000,00	255,56%	PU
Retribusi Tempat Khusus Parkir	160.000.000,00	193.623.016,00	121,01%	DISHUB
Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	10.500.000,00	21,00%	DISTANAK
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000.000,00	168.939.000,00	56,31%	DISHUB
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.157.656.000,00	803.984.000,00	69,45%	DISPAR, DISPORA dan DISDIKBUD
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000,00	12.825.000,00	42,75%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>Jumlah Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.787.656.000,00</b>	<b>1.419.871.016,00</b>	<b>79,43%</b>	
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	659.109.232,00	43,94%	DPMPPTSP
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	500.000.000,00	-	0,00%	
<b>Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>659.109.232,00</b>	<b>32,96%</b>	
<b>Jumlah Retribusi Daerah</b>	<b>487.720.481.700,00</b>	<b>150.640.043.072,68</b>	<b>30,89%</b>	

- Terdapat peningkatan Target Retribusi Daerah di tahun 2025.
- Peningkatan tersebut disebabkan penambahan rekening penerimaan **Retribusi Pelayanan Kesehatan** yang sebelumnya merupakan Pendapatan BLUD yang masuk pada **Lain-Lain PAD yang Sah**

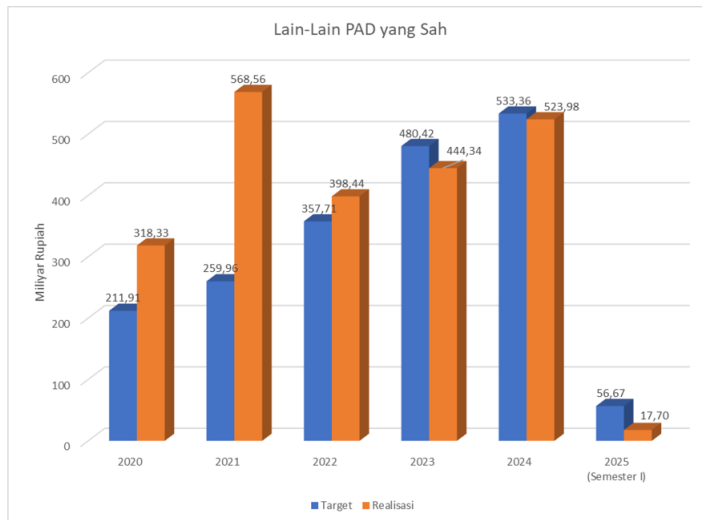
Realisasi Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2020 - 2024

## Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



Capaian Realisasi Lain Lain PAD yang sah selama tahun 2020 - 2024

## Lain-Lain PAD yang Sah



- Terdapat penurunan pada Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di tahun 2025.
- Penurunan tersebut disebabkan penambahan rekening penerimaan **Retribusi Pelayanan Kesehatan** yang sebelumnya merupakan Pendapatan BLUD yang masuk pada **Lain-Lain PAD yang Sah**

### 2.4 Kelompk sasaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Sasaran layanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur meliputi :

1. Masyarakat Umum
2. Perangkat Daerah yang mempunyai pendapatan
3. Perusahaan perusahaan yang mempunyai kewajiban terhadap pajak dan retribusi daerah provinsi

Dalam rangka melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat beberapa tantangan, disamping tantangan yang dihadapi, terdapat beberapa peluang yang dapat digunakan untuk pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya sebagai berikut:

#### 2.4.1. Tantangan

- Karakteristik geografis wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jarak ibukota kabupaten dengan beberapa kecamatan relatif jauh

sehingga menghambat pelaksanaan tata kelola, terutama pajak dan retribusi, sesuai dengan standar yang berlaku

- Masih rendahnya tingkat kemandirian daerah
- Diduga wajib pajak tidak memberi keterangan yang jelas dan benar mengenai jumlah penerimaan dari usaha yang dijalankan
- Wajib pajak dan Wajib Retribusi yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghindari pemungutan pajak / Retribusi, misal WP/WR tidak mendaftarkan diri sebagai WP/WR
- Kurangnya kesadaran WP/WR dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak / Retribusi
- Implikasi dari berlakunya peraturan perundangan mengenai kewenangan daerah berdampak pada terbatasnya potensi pendapatan daerah
- Sikap Masyarakat/Wajib Pajak yang masih apatis terkait manfaat yang diterima dari pembayaran pajak
- Perubahan data objek pajak dan retribusi daerah yang begitu cepat sehingga akan menyulitkan untuk melakukan pendataan wajib pajak dan Wajib Retribusi
- Pertumbuhan ekonomi melambat, yang berakibat ketidakstabilan daya beli masyarakat karena pendapatan yang cenderung menurun
- Penopang utama perekonomian Kutai Kartanegara masih bertumpu pada sektor primer pertambangan dan penggalian sehingga sangat rentan terhadap gejolak harga

#### 2.4.2. Peluang

- Pajak Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan potensi yang relatif besar dan kesadaran WP yang relatif tinggi.
- Perkembangan teknologi informasi menunjang pelaksanaan TUPOKSI organisasi
- Menerapkan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara online sebagai upaya pemberian layanan yang prima bagi WP / WR

- Terbukanya peluang untuk mengikuti Diklat

## 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- Belum **O**ptimalnya **C**apaian Indeks Pengelolaan Keuangan daerah (IPKD)
- Belum **O**ptimalnya **P**roses administrasi dan penagihan pajak daerah
- Belum tersedianya database potensi pajak daerah dan retribusi
- Masih rendahnya kemandirian fiscal daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah Badan **Perencanaan** Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara ringkas dapat dilihat pada table berikut.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum tersedianya database potensi pajak daerah dan retribusi daerah	Basis Data PBB P2 maupun 11 data pajak yang lain belum Valid	Data pajak daerah belum diteliti dan diverifikasi dengan baik
			Pelaksanaan Pemutahiran data Wajib Pajak Daerah yang belum optimal
		Pengawasan , pengendalian	Tidak maksimal nya pelaksanaan

		dan pemeriksaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum optimal	Pengendalian, Pemeriksaan Pengawasan Pajak Daerah
			OPD pengampu Retribusi belum optimal dalam penetapan target dan capaian realisasi Retribusi Daerah
		Tarif Pajak Daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengan perkembangan Ekonomi Daerah	Regulasi/ kebijakan pajak daerah dan retribusi belum di reviu secara berkala
	Belum optimalnya Proses administrasi dan penagihan pajak daerah	Penyelesaian Piutang Pajak Daerah Khususnya piutang PBB belum terlaksana secara optimal	<b>Jumlah piutang Pajak PBB merupakan komponen terbesar dalam jumlah rekapitulasi piutang Pajak Daerah</b>

		Belum ada regulasi yang pasti terkait Penyelesaian Piutang Non Pajak Daerah	Jumlah Tagihan Piutang Non Pajak Daerah merupakan salah satu komponen penerimaan pendapatan
			penyelesaian piutang pajak daerah melalui restitusi dan penghapusan piutang pajak daerah masih rendah
	Masih rendahnya kemandirian fiscal daerah	penerimaan pendapatan dana bagi hasil pusat sangat tinggi	Lemahnya basis data untuk perhitungan dana bagi hasil pusat

## 1.6 Isu-isu Strategis

Ditinjau dari aspek gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian dan Lembaga, sasaran jangka menengah dari Renstra Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur dan implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara bagi pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 -2029 antara lain :

- Peningkatan penerimaan Pajak Daerah dalam rangka menuju kemandirian fiskal daerah
- Peningkatan penerimaan pajak daerah dengan penerapan transaksi ekonomi digital
- Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah berbasis Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan kemudahan membayar pajak daerah

Tabel 2.1

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi pajak daerah	Belum Optimalnya Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan daerah (IPKD)	Optimalisasi PAD untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Perkembangan teknologi digital dalam pemungutan pajak	Kebijakan Pemerintah Pusat tentang digitalisasi pajak daerah	Persaingan antar daerah dalam menarik investasi	Peningkatan penerimaan Pajak Daerah dalam rangka menuju kemandirian fiskal daerah
Retribusi Daerah	Belum Optimalnya Proses administrasi dan penagihan pajak daerah	Moderenisasi sistem pemungutan pajak berbasis elektronik	Tekanan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik dari dunia internasional	Upaya Peningkatan rasio pajak nasional	Potensi mobilitas penduduk yang mempengaruhi objek pajak (hotel, restoran, hiburan)	Peningkatan penerimaan pajak daerah dengan penerapan transaksi ekonomi digital
Sistem Digitalisasi Pelayanan Pajak yang semakin Berkembang	Belum tersedianya database potensi pajak daerah dan retribusi	Peningkatan kualitas SDM Pengelola Pajak / Retribusi	Dampak krisis ekonomi global yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi lokal	Sinkronisasi kebijakan pajak pusat - daerah	Kerja sama antar daerah dalam pengelolaan data wajib pajak	Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah berbasis Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan kemudahan membayar pajak daerah
	Masih rendahnya kemandirian fiskal daerah					

### BAB III TUJUAN ,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara semata, akan tetapi perlu dukungan dari Stakeholders lainnya seperti Legislatif, Yudikatif, Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Kutai kartanegara, Pemerintah Daerah, serta Masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 - 2045.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD tahun 2045

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Sasaran Strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berkontribusi melaksanakan Tujuan “Mewujudkan TataKelola Pemerintah yang Baik berlandaskan demokrasi substansial dan stabilitas kondusivitas wilayah” dan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” yang tertuang didalam **RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 - 2045.**

Sedangkan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis. Tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu Tahun **2024 - 2026** berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya mendukung pencapaian pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut

#### TUJUAN

## Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Daerah

Adapun Indikator Tujuan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

### Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

Meningkatnya tata kelola pendapatan daerah

Dengan Indikator Kinerja Pengelolaan Pendapatan (Komponen IPKD)

### Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat

digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Berikut ini hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah.

(1) Kekuatan

- Memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, baik undang-undang maupun berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah
- Adanya dana operasional dalam memungut pajak daerah termasuk dana insentif pegawai sehingga memberikan motivasi pada pegawai pemungut pajak
- Jumlah pegawai yang cukup dengan tingkat pendidikan formal pegawai yang memadai.

(2) Kelemahan

- Belum tersedianya kajian akademis mengenai potensi PAD secara komprehensif sehingga sulit untuk menentukan target
- Data Wajib Pajak/Wajib Retribusi selama 10 Tahun terakhir masih belum up to date
- Pembangunan dan pengembangan sistem layanan dalam jaringan (online) belum optimal.

- Belum optimalnya dukungan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana (termasuk belum meratanya sarana pendukung pungutan PAD di semua kecamatan. Misalnya, masih adanya kantor UPT yang belum definitif milik pemerintah daerah (kontrak))
- Masih belum meratanya kompetensi yang dimiliki dengan tuntutan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang diemban.
- Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan PAD

### (3) Peluang

- Pajak Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan potensi yang relatif besar dan kesadaran WP yang relatif tinggi.
- Perkembangan teknologi informasi menunjang pelaksanaan TUPOKSI organisasi
- Adanya beberapa daerah yang telah menerapkan sistem pemungutan dan pembayaran pajak secara online sebagai upaya pemberian layanan yang prima bagi WP

### (4) Tantangan

- Karakteristik geografis wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jarak ibukota kabupaten dengan beberapa kecamatan relatif jauh sehingga menghambat pelaksanaan tata kelola, terutama pajak dan retribusi, sesuai dengan standar yang berlaku
- Masih rendahnya tingkat kemandirian daerah
- Diduga wajib pajak tidak memberi keterangan yang jelas dan benar mengenai jumlah penerimaan dari usaha yang dijalankan
- Wajib pajak yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghindari pemungutan pajak, misal wajib pajak tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

- Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, misalnya keterlambatan wajib pajak dalam mengembalikan SPTPD atau tidak menyetor SPTPD
- Implikasi dari berlakunya peraturan perundangan mengenai kewenangan daerah berdampak pada terbatasnya potensi pendapatan daerah
- Sikap Masyarakat/Wajib Pajak yang masih apatis terkait manfaat yang diterima dari pembayaran pajak
- Perubahan jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang begitu cepat sehingga akan menyulitkan untuk melakukan pendataan wajib pajak
- Pertumbuhan ekonomi melambat, yang berakibat ketidakstabilan daya beli masyarakat karena pendapatan yang cenderung menurun
- (j) Terjadinya penurunan harga komoditas sektor ekstraktif (migas dan tambang) berdampak pada porsi dana bagi hasil
- (k) Penopang utama perekonomian Kutai Kartanegara masih bertumpu pada sektor primer pertambangan dan penggalian sehingga sangat rentan terhadap gejolak harga

Berdasarkan hasil identifikasi diatas dapat dirumuskan formulasi strategi dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut

- Pengembangan sistem PAD online untuk semua layanan PAD
- Peningkatan kualitas SDM aparatur
- Pemetaan potensi baru bagi Pendapatan Asli Daerah
- Peningkatan ketersediaan database pajak dan retribusi yang komprehensif dan up to date
- Peningkatan dan inisiasi kerjasama antar-instansi yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber PAD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pendapatan daerah		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)		0,13	0,1	0,22	0,28	0,33	0,37	
		Meningkatnya tata kelola pendapatan daerah	Kinerja Pengelolaan Pendapatan (Komponen IPKD)		8,29	10,03	14,78	17,6	20,53	23,82	

**TABEL 3.3 PENAHAPAN RENSTRA PD**

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Pemenuhan Pemerataan Infrastruktur Wilayah dan Penataan Kelembagaan	Ekspansi Pembangunan berbasis Kewilayahan untuk Transformasi Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Tata Kelola	Peningkatan Pembangunan Fondasi Transformasi Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Tata Kelola	Perwujudan KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Fondasi Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan
Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan.	Penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan
Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik				

TABEL 3.4

N O	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	KETERANGA N
1	2	3	4	5
	Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya		Penyusunan sistem perencanaan penganggaran terpadu	
			Digitalisasi layanan publik	
			Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan	

TABEL 3.5

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	2	4	4	5
	Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya	Penyusunan sistem perencanaan penganggaran terpadu	Penyusunan sistem perencanaan penganggaran terpadu	
		Digitalisasi layanan publik	Digitalisasi layanan publik	
		Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan	Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan	

## Bab IV Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025 -2030), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tetap mengacu pada program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Penyajian program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai 2025 sampai dengan 2029 serta kondisi di akhir perencanaan.

Perencanaan program dan kegiatan setiap tahun mulai 2025 sampai dengan 2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah. Selanjutnya Renja Badan Pendapatan Daerah diselaraskan dengan program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD untuk menetapkan program dan kegiatan dalam Renja Badan Pendapatan Daerah.

Dengan berpedoman kepada Kepmendagri No. 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Adapun Program dan kegiatan yang digunakan Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan sebagai berikut :

### PROGRAM

1. Program Penujang urusan daerah pemerintah Kabupaten / kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan pendapatan daerah

### KEGIATAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### SUB KEGIATAN

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
10. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
11. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
13. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

20. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
26. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
27. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
28. . Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
29. . Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
30. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
31. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
32. Penetapan Wajib Pajak Daerah
33. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
34. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
35. Penagihan Pajak Daerah
36. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
37. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
38. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
39. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Matriks program/kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan dana indikatif masing-masing kegiatan terlampir dalam dokumen Renstra ini.



Tabel 4.2

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN /SUB.KEG</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kemandirian pembangunan daerah		Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)**		
		Meningkatnya tata kelola pendapatan daerah	Tersedianya laporan pendapatan daerah yang lebih akurat dan tepat waktu	Meningkatnya tata kelola pendapatan yang transparan, akuntabel, dan berbasis sistem	Kinerja Pengelolaan Pendapatan (Komponen IPKD)		
						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
						Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	



TABEL 4.3

BIDANG URUSAN/PR OGRAM/KEG IATAN/SUB.K EGIATAN	INDIKAT OR	BA SE LI NE 20 24	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR G ET	PAG U	TARG ET	PAG U	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
KEUANGAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Sakip Perangka t Daerah		B	51.3 50.0 00.0 00	B	51.3 50.0 00.0 00	B	51.35 0.000 .000	B	51.35 0.000 .000	B	51.35 0.000 .000		
Perencanaan, penganggaran , dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan , pengang garan dan Evaluasi Kinerja PD		9 Do k	900. 000. 000	9 Dok	900. 000. 000	9 Dok	900.0 00.00 0	9 Dok	900.0 00.00 0	9 Dok	900.0 00.00 0		

Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Do k	100. 000. 000	1 Dok	100. 000. 000	1 Dok	100.0 00.00 0	1 Dok	100.0 00.00 0	1 Dok	100.0 00.00 0	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah		1 BA	50.0 00.0 00	1 BA	50.0 00.0 00	1 BA	50.00 0.000	1 BA	50.00 0.000	1 BA	50.00 0.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Do k	450. 000. 000	6 Dok	450. 000. 000	6 Dok	450.0 00.00 0	6 Dok	450.0 00.00 0	6 Dok	450.0 00.00 0	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5 Lap	38.420.000.000	5 Lap	38.420.000.000	5 Lap	38.420.000.000	5 Lap	38.420.000.000	5 Lap	38.420.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN		12 Lap	38.000.000.000	12 Lap	38.000.000.000	12 Lap	38.000.000.000	12 Lap	38.000.000.000	12 Lap	38.000.000.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		12 Lap	150.000.000	12 Lap	150.000.000	12 Lap	150.000.000	12 Lap	150.000.000	12 Lap	150.000.000	
---	--	--	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	--

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		12 Lap	270.000.000	12 Lap	270.000.000	12 Lap	270.000.000	12 Lap	270.000.000	12 Lap	270.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Lap	300.000.000	4 Lap	300.000.000	4 Lap	300.000.000	4 Lap	300.000.000	4 Lap	300.000.000	

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKP		1 Lap	75.000.000	1 Lap	75.000.000	1 Lap	75.000.000	1 Lap	75.000.000	1 Lap	75.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		1 Lap	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000

	pada SKPD											
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKP	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	11 Dok	375.000.000	11 Dokumen	375.000.000	11 Dokumen	375.000.000	11 Dokumen	375.000.000	11 Dokumen	375.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	11 Dok	125.000.000	11 Dokumen	125.000.000	11 Dokumen	125.000.000	11 Dokumen	125.000.000	11 Dokumen	125.000.000	

	Kepegaw aian											
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasar kan Tugas dan Fungsi yang Mengikut i Pendidika n dan Pelatihan		30 Or an g	250. 000. 000	30 Orang	250. 000. 000	30 Orang	250.0 00.00 0	30 Orang	250.0 00.00 0	30 Orang	250.0 00.00 0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentas e Administ rasi umum Perangka t Daerah		80 %	1.96 5.00 0.00 0	80%	1.96 5.00 0.00 0	80%	1.965 .000. 000	80%	1.965 .000. 000	80%	1.965 .000. 000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan/minum)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	300.000.000	3 Paket	300.000.000	3 Paket	300.000.000	3 Paket	300.000.000	3 Paket	300.000.000

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	1.000.000.000	2 Laporan	1.000.000.000	2 Laporan	1.000.000.000	2 Laporan	1.000.000.000	2 Laporan	1.000.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah			4.00 0.00 0.00 0			4.00 0.00 0.00 0			4.000 .000. .000 000			4.000 .000. .000 000			4.000 .000. .000 000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3.00 0.00 0.00 0			3.00 0.00 0.00 0			3.000 .000. .000 000			3.000 .000. .000 000			3.000 .000. .000 000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di adakan			1.00 0.00 0.00 0			1.00 0.00 0.00 0			1.000 .000. .000 000			1.000 .000. .000 000			1.000 .000. .000 000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	2.740.000	12 Bulan	2.740.000	12 Bulan	2.740.000	12 Bulan	2.740.000	12 Bulan	2.740.000	
Penyediaan Jasa sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	1.500.000	12 Laporan	1.500.000	12 Laporan	1.500.000	12 Laporan	1.500.000	12 Laporan	1.500.000	

Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 La p	100. 000. 000	1 Lapor an	100. 000. 000	1 Lapor an	100.0 00.00 0	1 Lapor an	100.0 00.00 0	1 Lapor an	100.0 00.00 0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 La p	1.14 0.00 0.00 0	12 Lapor an	1.14 0.00 0.00 0	12 Lapor an	1.140 .000. 000	12 Lapor an	1.140 .000. 000	12 Lapor an	1.140 .000. 000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	85 %	2.65 0.00 0.00 0	85%	2.65 0.00 0.00 0	85%	2.650 .000. 000	85%	2.650 .000. 000	85%	2.650 .000. 000	

	ah daerah											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	650.000.000	26 Unit	650.000.000	26 Unit	650.000.000	26 Unit	650.000.000	26 Unit	650.000.000	
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	

Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara/direhabilitasi			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah			6.150.000								
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Terhadap Potensi Pajak			6.150.000		6.150.000		6.150.000		6.150.000		
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen		400.000	2 Dokumen	400.000	2 Dokumen	400.000	2 Dokumen	400.000		

<p>Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah</p>	<p>Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah</p>		<p>1 Do ku</p>	<p>350.000.000</p>	<p>1 Doku men Analisis</p>	<p>350.000.000</p>	<p>1 Doku men Analisis</p>	<p>350.000.000</p>	<p>1 Doku men Analisis</p>	<p>350.000.000</p>	<p>1 Doku men Analisis</p>	<p>350.000.000</p>	
<p>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</p>	<p>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</p>		<p>3 La por an</p>	<p>750.000.000</p>	<p>3 Lapor an</p>	<p>750.000.000</p>	<p>3 Lapor an</p>	<p>750.000.000</p>	<p>3 Lapor an</p>	<p>750.000.000</p>	<p>3 Lapor an</p>	<p>750.000.000</p>	

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	1.500.000,00	2 Laporan	1.500.000,00	2 Laporan	1.500.000,00	2 Laporan	1.500.000,00	2 Laporan	1.500.000,00	
Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	300.000,00	1 Laporan	300.000,00	1 Laporan	300.000,00	1 Laporan	300.000,00	1 Laporan	300.000,00	

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya			300.000.000	300.000.000			300.000.000		300.000.000			300.000.000
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen		200.000.000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		2 Layanan	200.000.000	2 Layanan	200.000.000	2 Layanan	200.000.000	2 Layanan	200.000.000	2 Layanan		200.000.000

Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		11 Laporan	300.000.000	11 Laporan	300.000.000	11 Laporan	300.000.000	11 Laporan	300.000.000	11 Laporan	300.000.000
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	350.000.000

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak		1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	
Elektronifikasi				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	



TABEL 4.4 DAFTAR SUB.KEG PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB.KEG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan pajak Daerah	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	
			Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	

			Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	
			Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	
			Penagihan Pajak Daerah	
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	





## Bab VIII

### Penutup

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2025 - 2030 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Tujuan dan sasaran, sehingga akhirnya terbentuk rencana strategik yang meliputi Kebijakan serta Program dan Kegiatan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 - 2030 ini di susun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan keuangan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah di spesifikasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2045

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini akan terus disempurnakan dalam upaya meningkatkan daya dan hasil gunanya sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Program dan Kegiatan serta menjadi acuan dalam proses perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas prioritas daerah yang telah dicanangkan. Serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.